

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, Januari 2024  
Kepala,

Syukur Idayati

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
VI. Lampiran dan Daftar	

**BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA**  
**KOMPLEK PASAR WISATA KEDENSARI TANGGULANGIN SIDOARJO**  
**JAWA TIMUR**  
**TELEPON (031) 8855149, FAXIMILE (031) 8856150**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, Januari 2024  
Kepala,

Syukur Idayati  
NIP 197604252006042002

Laporan Keuangan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Tahun 2023 semester 2 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada semester 2 Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp387.741.458 atau mencapai 129.25 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp300.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada semester 2 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.156.348.785 atau mencapai 99,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.160.889.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.426.981.556,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 28.206.647,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp7.398.774.909,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.626.183,- dan Rp7.397.355.373,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp384.277.500,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.840.773.798,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp15.456.496.298,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.005.458 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp15.451.490.340,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.079.544.636,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp15.451.490.340,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp693.750,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.768.607.327,-. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp7.397.355.373,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	300.000.000	387.741.458	129,25	395.198.422
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>300.000.000</b>	<b>387.741.458</b>	<b>129,25</b>	<b>395.198.422</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	4.100.000.000	4.096.815.987	99,92	3.694.967.819
Belanja Barang	B.4	9.793.740.000	9.792.386.573	99,99	9.502.938.556
Belanja Modal	B.5	267.149.000	267.146.225	100,00	603.147.649
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>14.160.889.000</b>	<b>14.156.348.785</b>	<b>99,97</b>	<b>13.801.054.024</b>

Kepala Balai

Syukur Idayati  
NIP 197604252006042002

## II. NERACA

### BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	28.206.647	16.307.400
Jumlah Aset Lancar		28.206.647	16.307.400
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	40.678.817.680	41.411.317.455
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	6.000.000	6.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	30.511.250	30.511.250
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(33.316.554.021)	(32.269.078.594)
Jumlah Aset Tetap		7.398.774.909	9.178.750.111
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	1.156.329.000	2.013.899.250
Aset Lain-Lain	C.22	318.104.400	320.194.400
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.474.433.400)	(2.334.093.650)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.426.981.556</b>	<b>9.195.057.511</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	29.626.183	113.970.875
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	1.542.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		29.626.183	115.512.875
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>29.626.183</b>	<b>115.512.875</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	7.397.355.373	9.079.544.636
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>7.397.355.373</b>	<b>9.079.544.636</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>7.426.981.556</b>	<b>9.195.057.511</b>

Kepala Balai

Syukur Idayati  
NIP 197604252006042002

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	384.277.500	393.656.350
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>384.277.500</b>	<b>393.656.350</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	4.013.043.717	3.788.893.635
Beban Persediaan	D.3	286.068.879	296.548.390
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.450.256.066	5.653.708.577
Beban Pemeliharaan	D.5	1.041.829.884	589.563.206
Beban Perjalanan	D.6	3.001.760.075	2.982.783.542
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.047.815.177	2.216.062.073
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>15.840.773.798</b>	<b>15.527.559.423</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(15.456.496.298)</b>	<b>(15.133.903.073)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		5.005.458	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		500	72
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>5.005.958</b>	<b>72</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(15.451.490.340)</b>	<b>(15.133.903.001)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(15.451.490.340)</b>	<b>(15.133.903.001)</b>

Kepala Balai

Syukur Idayati  
NIP 197604252006042002



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	9.079.544.636	10.807.592.035
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15.458.986.423)	(15.133.903.001)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	693.750	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	693.750	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
JUMLAH		693.750	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.768.607.327	13.405.855.602
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.682.189.263)	(1.728.047.399)
EKUITAS AKHIR	E.5	7.397.355.373	9.079.544.636

Kepala Balai

Syukur Idayati  
NIP 197604252006042002

## A. PENJELASAN UMUM

### V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Tantangan dalam pengembangan IKM alas kaki nasional masih membutuhkan *effort* yang cukup besar. BPIPI (Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengembangan industri alas kaki di Indonesia memegang peranan sentral dalam perkuatan dukungan layanan bagi IKM alas kaki nasional. Perencanaan yang baik dan implementasi program yang tepat sasaran memerlukan dukungan banyak pihak agar mampu memberikan dampak langsung bagi IKM.

Sebuah tantangan sekaligus ancaman. Tergantung perspektif sisi mana kita gunakan sebagai masyarakat industri alas kaki Indonesia. Perspektif ini harus digunakan secara proporsional, karena keduanya (tantangan dan ancaman) akan sangat berguna untuk menyusun strategi kedepan secara sistematis dan terukur.

Perspektif Tantangan, adalah sebuah sudut pandang positif bagaimana melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario /gambaran /kondisi terbaik yang akan dicapai. Berawal dari titik ini, Industri Alas Kaki harus menyiapkan diri dan potensi internalnya untuk memperoleh manfaat dan nilai tambah sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Diperlukan strategi untuk menangkap peluang di masa depan.

Perspektif Ancaman, sebuah sudut pandang (bukan negatif) yang melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terburuk yang akan diterima atas konsekuensi perubahan di masa depan.

Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku merupakan potensi natural yang dimiliki oleh masyarakat industri alas kaki Indonesia. Keunggulan tersebut harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri lokal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Namun yang perlu diwaspadai, dalam jangka panjang potensi natural IKM alas kaki nasional (Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku) tidak bisa menjadi acuan utama strategi pengembangan industri, akan lebih banyak faktor eksternal (tantangan sekaligus ancaman) yang akan mereduksi nilai manfaat potensi tersebut. Faktor eksternal tersebut seperti perubahan demografi, perilaku dan struktur pasar, perkembangan teknologi dan perubahan pada etika dan aturan bisnis bahkan lingkungan.

Dengan tetap konsisten pada rencana strategi lima tahun yang sudah tersusun (2022 – 2024), BPIPI mencoba sebuah pendekatan 5 (lima) pilar strategi organisasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan
- Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen
- Mengembangkan pusat desain persepatuan

- Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan
- Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 semester 2 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 semester 2 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Pendapatan- LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi di Bidang Perindustrian pada laboratorium uji BPIPI diakui ketika pembayaran jasa pengujian produk.
  - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu diakui ketika kelebihan belanja pegawai telah disetor ke Negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

##### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

##### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.



## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan*

### *Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pagu awal sebesar Rp14.310.889.000 setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp14.160.889.000

Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini :

### *Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023*

Uraian	2023	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.900.000.000	4.100.000.000
Belanja Barang	10.111.720.000	9.793.740.000
Belanja Modal	299.169.000	267.149.000
<b>Estimasi Pendapatan PNB</b>		
Pendapatan PNB Lainnya	300.000.000	300.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.310.889.000</b>	<b>14.160.889.000</b>

Revisi belanja pegawai mengalami penambahan sebesar Rp200.000.000 dikarenakan terdapat penerimaan pegawai PPPK dan pengangkatan Jabatan Fungsional. Belanja barang operasional mengalami kenaikan sebesar Rp53.296.000, pengurangan belanja barang non operasional sebesar Rp267.495.000, penambahan belanja barang persediaan sebesar Rp69.362.000, pengurangan belanja jasa sebesar Rp302.378.000, penambahan belanja pemeliharaan sebesar Rp149.279.000, belanja barang perjalanan dinas dalam negeri mendapat penambahan pagu sebesar Rp145.769.000, pengurangan belanja perjalanan luar negeri sebesar Rp138.840.000. Belanja modal berkurang sebesar Rp32.020.000.

Tidak terdapat Penganggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada Tahun 2023.



*Realisasi*  
*Pendapatan*  
*Rp387.741.458*

## **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp387.741.458 atau mencapai 129.25 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000. Pendapatan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia terdiri dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi; Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	227.425.000	161.302.500	39,79
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	72.575.000	221.433.000	137,51
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	5.005.458	
Pendapatan Denda	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	500	-
<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>	<b>387.741.458</b>	<b>129,25</b>

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum merupakan pendapatan yang berasal dari pengujian produk persepatuan di laboratorium uji alas kaki BPIPI. Sedangkan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPIPI. Pendapatan Jasa berasal dari penerimaan atas jasa pengawasan/pemeriksaan. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan hasil lelang BMN berupa satu paket peralatan kantor. Pendapatan lain-lain berasal dari pembulatan belanja pegawai TAYL.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami

penurunan sebesar 1,89 (persen) dibandingkan periode yang sama di TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	161.302.500	188.782.750	(14,56)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	221.433.000	206.415.600	7,28
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	5.005.458	-	
Pendapatan Denda	-	-	
Pendapatan Lain-lain	500	72	594,44
<b>Jumlah</b>	<b>387.741.458</b>	<b>395.198.422</b>	<b>(1,89)</b>

*Realisasi*

**B.2. Belanja**

*Belanja Negara*

*Rp14.156.348.785*

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2023 Semester 2 adalah sebesar Rp14.156.348.785,- atau 99,97% dari anggaran belanja sebesar Rp14.160.889.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 Semester 2 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.100.000.000	4.096.816.604	99,92
Belanja Barang	9.793.740.000	9.812.836.601	100,19
Belanja Modal	267.149.000	267.146.225	100,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>14.160.889.000</b>	<b>14.176.799.430</b>	100,11
Pengembalian	-	(20.450.645)	
<b>Jumlah</b>	<b>14.160.889.000</b>	<b>14.156.348.785</b>	99,97

Pengembalian belanja sebesar Rp20.450.645,- terdiri dari Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp617; Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp460.000; Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp16.021.640; Pengembalian

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp3.968.388.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 semester 2, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 semester 2 mengalami Kenaikan sebesar 2,57 (persen) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Naiknya pagu anggaran BPIPI dibandingkan dengan tahun sebelumnya berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah realisasi anggaran.

*Perbandingan Realisasi Belanja  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022	(NAIK) TURUN %
Belanja Pegawai	4.096.815.987	3.694.967.819	10,88
Belanja Barang	9.792.386.573	9.502.938.556	3,05
Belanja Modal	267.146.225	603.147.649	(55,71)
<b>Jumlah</b>	<b>14.156.348.785</b>	<b>13.801.054.024</b>	<b>2,57</b>

*Belanja  
Pegawai  
Rp4.096.815.987,-*

**B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 semester 2 dan 2022 semester 2 adalah masing-masing sebesar Rp4.096.815.987 dan Rp3.694.967.819. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 semester 2 mengalami kenaikan sebesar 10,88 % (persen) dari Tahun Anggaran 2022 semester 2. Hal ini disebabkan

karena adanya kenaikan gaji pegawai, bertambahnya jumlah pejabat fungsional, dan meningkatnya lembur pegawai dikarenakan adanya pendampingan Pelatihan IKM yang dilaksanakan diluar hari kerja.

*Perbandingan Belanja Pegawai  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.969.785.772	1.941.797.353	<b>1,44</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	56.234.231	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	86.218.000	47.623.000	<b>81,04</b>
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.984.578.601	1.705.548.218	<b>16,36</b>
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.096.816.604</b>	<b>3.694.968.571</b>	<b>10,88</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(617)	(752)	<b>(17,95)</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.096.815.987</b>	<b>3.694.967.819</b>	<b>10,88</b>

*Belanja  
Barang Rp  
9.792.386.573,-*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 semester 2 dan 2022 semester 2 adalah masing-masing sebesar Rp9.792.386.573 dan Rp9.502.938.556. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 semester 2 mengalami kenaikan sebesar 3,05 % (persen) dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 semester 2. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pendampingan dan pembinaan IKM Alas Kaki untuk mendukung program Fasilitasi dan Pembinaan Industri sehingga belanja barang operasional, belanja non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri mengalami kenaikan.

*Perbandingan Belanja Barang  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.529.810.104	1.430.753.590	6,92
Belanja Barang Non Operasional	2.164.571.175	2.129.930.491	1,63
Belanja Barang Persediaan	421.271.616	326.980.190	28,84
Belanja Jasa	1.756.907.209	2.073.100.309	(15,25)
Belanja Pemeliharaan	918.526.394	559.511.306	64,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.015.151.503	2.877.255.246	4,79
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.598.600	105.528.296	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.812.836.601</b>	<b>9.503.059.428</b>	<b>3,26</b>
Pengembalian Belanja	(20.450.028)	(120.872)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.792.386.573</b>	<b>9.502.938.556</b>	<b>3,05</b>

Setelah dilakukannya revisi anggaran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia tidak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

*Belanja Barang  
penanganan Pandemi COVID-19*

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	NAIK (TURUN) %
521131	Belanja Barang Operasional	-	-	-
522192	Belanja Jasa	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Belanja Modal  
Rp 267.146.225,-*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal semester 2 Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp267.146.225 dan Rp603.147.649. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023

mengalami penurunan sebesar 56% (persen) dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal*

*Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.146.225	603.147.649	(56)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>267.146.225</b>	<b>603.147.649</b>	<b>(56)</b>
Pengembalian	0	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>267.146.225</b>	<b>603.147.649</b>	<b>(56)</b>

Tidak terdapat Alokasi Anggaran Belanja Modal Untuk penanganan pandemi COVID-19 Pada Tahun 2023.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

***B.6 Belanja Bantuan Sosial***

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  
Per 31 Desember dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Uang Tunai		
Bank BERSAMA No.acc 82111487451		
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas  
Rp0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang PNB  
Rp0*

### **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan



pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Selama periode Tahun 2023, pelayanan yang menghasilkan PNBPN telah diterima pembayarannya hingga tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar*  
*Tagihan*  
*TP/TGR*  
*Rp0*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

No	Nama	31-Dec-23	31-Dec-22
1			
2			
3			
<b>Jumlah</b>			

*Bagian Lancar*  
*TPA*  
*Rp0*

## **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

No	Nama	31-Dec-23	31-Dec-22
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

*Penyisihan*  
*Piutang Tak*  
*Tertagih –*  
*Piutang Lancar*  
*Rp 0*

## **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja*  
*Dibayar di*  
*Muka*  
*Rp.0*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
Pembayaran Belanja Pegawai	Rp -	Rp -
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus  
Diterima  
Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	TH 2023	TH 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan  
Rp28.206.647*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.206.647 dan Rp16.307.400.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*  
*Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	18.069.897	16.307.400
Barang untuk Pemeliharaan	1.955.750	-
Bahan Baku	8.181.000	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>28.206.647</b>	<b>16.307.400</b>

Pada periode akhir pelaporan, tidak terdapat saldo persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Adapun mutasi persediaan sebagai berikut:

<b>Saldo Persediaan per 31 Desember 2022</b>		<b>16.307.400</b>
<b>Mutasi tambah</b>		
Pembelian		421.271.616
<b>Beban Persediaan</b>		
Beban Persediaan Konsumsi		118.784.589
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan		20.698.800
Beban Persediaan Suku Cadang		102.604.690
Bahan Persediaan Bahan Baku		167.284.290
Bahan Persediaan Lainnya		0
<b>Saldo Persediaan per 31 Desember 2023</b>		<b>28.206.647</b>

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

No	Debitur	31-Dec-23	31-Dec-22
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Debitur	31-Dec-23	31-Dec-22
Jumlah		

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

*Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang Per 31 Desember 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Tanah  
Rp0*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap berupa tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> sebesar Rp.0,00 dikarenakan tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Per 31 Desember 2023*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
3			
4			
<b>Jumlah</b>			

### C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp40.678.817.680*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp40.678.817.680 dan Rp41.411.317.455 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>41.411.317.455</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	267.146.225
Reklasifikasi Masuk	283.438.500
Hibah Barang	
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	999.646.000
Reklasifikasi Keluar	283.438.500
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>40.678.817.680</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	33.313.854.021
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>7.364.963.659</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan



peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Hardisk sebanyak 1 unit senilai Rp1.750.000,-. Pembelian Mini Komputer Sebanyak 2 unit senilai Rp7.534.800,-. Pembelian Telephone Mobile sebanyak 1 unit sebesar Rp20.086.000,-. Pembelian Laptop sebanyak 3 unit sebesar Rp73.350.000,- dan Pembelian Printer sebanyak 3 unit sebesar Rp18.600.000.
- b. Pembelian Peralatan Permainan sebanyak 1 unit senilai Rp.1.899.900,-
- c. Pembelian Lemari/Rak Besi 3 Laci sebanyak 1 Unit Senilai Rp1.899.000,- dan Lemari Kayu sebanyak 2 unit senilai Rp3.899.225,-
- d. Pembelian Filling Cabinet Kayu sebanyak 1 Unit senilai Rp2.190.000,-
- e. Pembelian Meja Kayu sebanyak 2 Unit senilai Rp3.580.000,- Pembelian Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 2 unit senilai Rp4.780.000,- Dan Pembelian Kursi Besi/metal sebanyak 1 unit senilai Rp3.664.000,-
- f. Pembelian Lemari Es sebanyak 1 unit senilai Rp1.398.000,-
- g. Pembelian Saran Pendampingan Berupa Televisi sebanyak 2 unit senilai Rp11.531.000,- Pembelian Board Display sebanyak 1 unit senilai Rp4.507.800,-
- h. Pembelian Camera Video USB Webcam sebanyak 1 unit senilai Rp1.088.500,-
- i. Pembelian Dispenser sebanyak 3 unit senilai Rp9.464.000,-.
- j. Pembelian Bracket Standing Peralatan sebanyak 1 unit senilai Rp1.499.000,-. Pembelian Wheel Chair

sebanyak 1 unit senilai Rp1.365.000,-.

- k. Pembelian Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik Lainnya sebanyak 2 unit senilai Rp85.660.000.
- l. Pembelian Mesin Absensi sebanyak 1 unit sebesar Rp7.400.000.

Mutasi kurang berupa penghentian dari penggunaan dikarenakan status BMN yang mengalami rusak berat berdasarkan Nota Dinas Permohonan persetujuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan nomor 1063/IKMA/BPIPI/BMN/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023.

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dilakukan karena adanya kesalahan catat kode barang sesuai Surat Keterangan Nomor 2386/IKMA/BPIPI/BMN/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 dengan BMN yang Tercatat adalah Handy Cam senilai Rp149.000.000 dan Laptop senilai Rp20.450.000. Surat keterangan Nomor 1179/IKMA/BPIPI/BMN/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023 dengan BMN yang tercatat adalah kamera digital senilai Rp98.783.500, Reveiver Audio/Video sebesar Rp7.400.000, Layar Proyektor senilai Rp2.255.000, dan Peralatan Laboratorium Litbagyasa untuk pengujian dan sertifikasi senilai Rp5.550.000-.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp0*

#### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan seluas 3.500 m<sup>2</sup> sebesar Rp0,00 dikarenakan Gedung dan Bangunan yang

dipakai Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

*Jalan, Jaringan dan Irigasi*  
*Rp6.000.000*

**C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp6.000.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>6.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>6.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.700.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>3.300.000</b>

Pada Neraca (Face) nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp6.000.000, dikarenakan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.700.000 telah diakumulasikan dengan nilai penyusutan peralatan dan mesin pada akumulasi penyusutan. Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp30.511.250*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp30.511.250 dan Rp30.511.250. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>30.511.250</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>30.511.250</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>30.511.250</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tidak terdapat dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp33.316.554.021,-*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp33.316.554.021 dan Rp32.269.078.594 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	40.678.817.680	33.313.854.021	7.364.963.659
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.000.000	2.700.000	3.300.000
4	Aset Tetap Lainnya	30.511.250	0	30.511.250
<b>Jumlah</b>		<b>40.715.328.930</b>	<b>33.316.554.021</b>	<b>7.398.774.909</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp1.156.329.000*

#### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.156.329.000 dan Rp2.013.899.250.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berdasarkan SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2976 Tahun 2023 Tanggal 27 Juni 2023, dilakukan penghapusan aset tidak berwujud berupa beban Amortisasi sebesar Rp857.570.250 dikarenakan masa manfaat yang telah habis dan *software* yang dimiliki sudah tidak sesuai dengan perkembangan

teknologi. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>2.013.899.250</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Beban Amortisasi	857.570.250
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.156.329.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(1.156.329.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp318.104.400*

## C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp318.104.400 dan Rp320.194.400. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>320.194.400</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	1.156.180.000
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	149.000.000
- penghapusan BMN	1.009.270.000
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>318.104.400</b>
Akumulasi Penyusutan	(318.104.400)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Mutasi kurang berasal dari data Unit Peralatan dan Mesin dengan status rusak berat yang dicatat dengan nomor bukti 4708 Tahun 2023, Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp149.000.000,- berdasarkan transaksi 1 Unit Handy Cam sebesar Rp149.000.000,- yang dicatat dengan nomor bukti 2386/IKMA/BPIPI/BMN/X/2023.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp1.474.433.400*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp1.474.433.400 dan Rp2.334.093.650. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Amortisasi Software	1.156.329.000	1.156.329.000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	318.104.400	318.104.400	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.474.433.400</b>	<b>1.474.433.400</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp0,-*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran

pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp29.626.183,-*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp29.626.183 dan Rp113.970.875. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	10.153.546
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	19.472.637
<b>Jumlah</b>	<b>29.626.183</b>

Berdasarkan Data Pada Tabel di atas terdapat Tunjangan kinerja Pegawai Bulan Desember 2023 sebesar Rp10.153.546, Pembayaran Langganan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp16.793.005, Pembayaran Langganan Internet bulan Desember sebesar Rp1.693.030, dan Pembayaran Langganan Telepon bulan Desember sebesar Rp986.602. Tidak terdapat belanja penanganan Covid-19 pada rincian utang kepada pihak ketiga.

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp0,-*

#### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.542.000 . Pendapatan Diterima di



Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar  
Rp0*

### **C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas  
Rp7.397.355.373,-*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.397.355.373 dan Rp9.079.544.636. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP  
Rp384.277.500.*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp384.277.500 dan Rp393.656.350. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak*

*Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi di Bidang Perindustrian	162.844.500	187.240.750	(13)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	221.433.000	206.415.600	7
Pendapatan Anggaran lain-lain	0	0	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>384.277.500</b>	<b>393.656.350</b>	<b>(2)</b>

Pendapatan LO pada BPIPI berupa pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi di bidang perindustrian berasal dari jasa pengujian pada laboratorium uji alas kaki sebesar Rp.162.844.500; pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan berasal dari jasa pelatihan tentang alas kaki sebesar Rp221.433.000.

Terdapat penurunan pendapatan sebesar 2% dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 Salah satu fokus utama layanan BPIPI adalah memberikan pendampingan kepada IKM dibidang pelayanan teknis hingga pendampingan legalitas yang harus dipenuhi oleh industri, sehingga Sebagian besar pelayanan uji lab dan sertifikasi diberikan secara gratis terhadap IKM

kecil yang cenderung memiliki keterbatasan biaya dalam melakukan pengujian. Selain hal tersebut, adanya dampak setelah masa pandemi covid-19 pada IKM besar yang memiliki kemampuan biaya dalam melakukan pengujian dan sertifikasi produk mulai kehilangan pasar ekspor, sehingga menjadi salah satu penyebab Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi di Bidang Perindustrian mengalami penurunan pada tahun 2023 .

#### *Beban*

#### *Pegawai*

*Rp4.013.043.717*

#### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.013.043.717 dan Rp3.788.893.635. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya rekrutmen pegawai baru PPPK dan kenaikan jabatan fungsional pegawai.

*Rincian Beban Pegawai*  
*Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.340.221.040	1.331.707.440	1%
Beban Gaji Pokok PPPK	37.044.700	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.888	21.567	1%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	717	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	103.821.516	107.186.696	-3%
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.221.220	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	34.180.724	34.359.692	-1%
Beban Tunj. Anak PPPK	1.092.114	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	103.040.000	68.235.000	51%
Beban Tunj. Fungsional PPPK	5.450.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	922.567	708.866	30%
Beban Tunj. Beras PNS	97.839.420	99.722.340	-2%
Beban Tunj. Beras PPPK	3.186.480	-	-
Beban Uang Makan PNS	211.523.000	230.780.000	-8%
Beban Uang Makan PPPK	7.239.000	-	-
Beban Tunj. Umum PNS	43.585.000	53.305.000	-18%
Beban Uang Lembur	79.693.000	47.623.000	67%
Beban Uang Lembur PPPK	6.525.000	-	-
Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	1.856.130.531	-	-
Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan) PPF	54.105.800	1.790.044.034	-97%
<b>Jumlah</b>	<b>4.013.043.717</b>	<b>3.788.893.635</b>	<b>6%</b>

*Beban*  
*Persediaan*  
*Rp286.068.879,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp286.068.879 dan Rp296.548.390. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	118.784.589	151.799.287	-22
Beban Persediaan Bahan Baku	167.284.290	144.749.103	16
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>286.068.879</b>	<b>296.548.390</b>	<b>-4</b>

Tidak terdapat realisasi persediaan atas Penanganan Pandemi COVID-19.

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp5.450.256.066*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.450.256.066 dan Rp5.653.708.577. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena naiknya realisasi beban bahan, honor output kegiatan, beban barang non operasional lainnya, beban langganan daya dan jasa lainnya, dan beban jasa profesi. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa*  
*Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.279.846.932	1.141.859.060	12,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.943.172	17.787.480	(55,34)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	241.560.000	268.200.000	(9,93)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	2.907.050	(100,00)
Beban Bahan	1.346.739.467	1.489.621.260	(9,59)
Beban Honor Output Kegiatan	326.650.000	411.550.000	(20,63)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	283.682.708	161.759.231	75,37
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang	206.500.000	67.000.000	208,21
Beban Langganan Listrik	226.800.733	165.923.000	36,69
Beban Langganan Telepon	12.550.137	11.930.300	5,20
Beban Langgan Daya dan Jasa Lainnya	63.506.880	81.869.700	(22,43)
Beban Jas Konsultasi	27.750.000	0	100,00
Beban Sewa	55.409.827	213.156.834	(74,01)
Beban Jasa Profesi	699.440.000	935.185.000	(25,21)
Beban Jasa Lainnya	670.877.210	657.808.662	1,99
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	27.151.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	999.000	0	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.450.256.066</b>	<b>5.653.708.577</b>	<b>(3,60)</b>

Tidak terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa atas Penanganan Pandemi COVID-19.

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp1.041.829.884*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.041.829.884 dan Rp589.563.206. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan pada tahun 2023 merupakan bentuk komitmen BPIPI dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif dan memadai untuk diakses oleh kelompok rentan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	635.248.772	282.719.872	124,69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.277.622	276.791.434	2,34
Beban Pemeliharaan bahan untuk pemeliharaan	20.698.800	14.711.600	40,70
Beban Persediaan suku cadang	102.604.690	15.340.300	568,86
<b>Jumlah</b>	<b>1.041.829.884</b>	<b>589.563.206</b>	<b>76,71</b>

Tidak terdapat realisasi Beban Pemeliharaan Penanganan Pandemi COVID-19.

*Beban*

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp3.001.760.075*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.001.760.075 dan Rp2.982.783.542. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan frekuensi perjalanan dinas untuk pendampingan dan pembinaan IKM Alas kaki. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.054.022.610	2.166.009.285	(5,17)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.750.000	57.000.000	(33,77)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	261.085.754	290.918.006	(10,25)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	642.303.111	363.327.955	76,78
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6.598.600	105.528.296	(93,75)
<b>Jumlah</b>	<b>3.001.760.075</b>	<b>2.982.783.542</b>	0,64

Tidak terdapat realisasi Beban Pemeliharaan Penanganan Pandemi COVID-19.

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Beban  
Bantuan  
Sosial  
Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	21-Dec-22	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp2.047.815.177*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.047.815.177 dan Rp2.216.062.073. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.046.913.052	2.200.123.293	(6,96)
Beban Penyusutan Jaringan	150.000	150.000	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	752.125	-	100,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>2.047.815.177</b>	<b>2.200.273.293</b>	(6,93)
Beban Amortisasi Software	0	15.788.780	(100,00)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>15.788.780</b>	(100,00)
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2.047.815.177</b>	<b>2.216.062.073</b>	(7,59)

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp5.005.958*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022 Semester 2 masing-masing Rp5.005.958 dan Rp0. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	5.005.458	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	500	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>5.005.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan

2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp9.079.544.636*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan LPE (Face) adalah masing-masing sebesar Rp9.079.544.636 dan Rp10.807.592.035.

*Defisit LO*  
*Rp15.451.490.340*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.451.490.340 dan Rp15.133.903.001. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas

*Rp0,-* nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yangwa terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset  
Tetap*

*Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset  
Tetap Non*

*Revaluasi  
Rp693.750*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp693.750 dan Rp0. Merupakan nilai yang berasal dari reklasifikasi keluar aset tetap.

*Koreksi Lain-  
Lain  
Rp0*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi*

*Antar Entitas*

*Rp13.768.607.327,-*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.768.607.327 dan

Rp13.405.855.602. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(387.741.458)
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.156.348.785
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.768.607.327</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp387.741.458 sedangkan DKEL sebesar Rp14.156.348.785.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Jumlah		

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pada periode pelaporan BPIPI tidak menerima transfer masuk maupun transfer keluar terkait penanganan pandemic Covid19.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Tidak Terdapat Dampak Pandemi Covid-19 Yang mempengaruhi Saldo Hibah.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp.7.397.355.373*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.397.355.373 dan Rp9.079.544.636.

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

-

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**